

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Modal Kerja

Setiap perusahaan selalu membutuhkan sejumlah dana untuk membelanjai pelaksanaan kegiatannya sehari-hari. Kebutuhan dana tersebut, misalnya untuk membeli bahan baku, membayar upah buruh dan sejenisnya, serta untuk membayar kewajiban-kewajiban lainnya yang berkaitan erat dengan bidang kegiatan usaha perusahaan tersebut.

Istilah dana dapat diartikan dalam berbagai cara. Ikatan Akuntansi Indonesia memberikan pengertian mengenai konsep dana sebagai berikut : “ Dana dapat diinterpretasikan sebagai kas atau ekuivalennya, dapat juga diartikan sebagai modal kerja, yaitu: aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar. Skripsi ini akan digunakan pengertian dana sebagai modal kerja.

Bambang Riyanto (2008:57), menyatakan ada beberapa konsep sehubungan dengan pengertian modal kerja, yaitu:

1. Konsep Kuantitatif

Modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar atau sering disebut modal kerja bruto (gross working capital)

2. Konsep Kualitatif

Modal kerja menurut konsep ini adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang lancarnya atau sering disebut modal kerja netto (net working capital)

3. Konsep Fungsional

Modal kerja menurut konsep ini adalah dana yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dalam periode sekarang (current income) sesuai dengan didirikan perusahaan tersebut.

Untuk kepentingan akuntansi, maka Dr. Saud Husman M.B.A., (2003:178), memberikan pengertian mengenai aktiva lancar sebagai : “aktiva yang secara normal berubah menjadi kas dalam waktu satu tahun atau kurang.” Manajemen kerja biasanya menyangkut aktiva-aktiva lancar ini yaitu kas dan surat-surat berharga, piutang dan persediaan.

Kewajiban lancar atau hutang jangka pendek didefinisikan oleh Budi Rahardjo (2004:19), sebagai : *“hutang yang jangka waktunya satu tahun terhitung dari tanggal neraca dibuat”*.

Penggunaan satu tahun termasuk berlaku jika siklus operasi normal perusahaan lebih singkat 12 bulan. Bila lebih dari 12 bulan, criteria yang digunakan adalah siklus operasi normal perusahaan yang bersangkutan.

2.2. Sumber dan Penggunaan Modal Kerja

Aliran dana atau modal kerja di dalam setiap perusahaan dapat digambarkan sebagai proses yang berkesinambungan dan bersifat tertutup sehingga setiap pengguna modal kerja harus ada sumbernya.

1. Sumber Modal Kerja

Pada dasarnya modal kerja itu terdiri dari dua bagian pokok, yaitu :

a. Bagian yang tetap atau bagian yang permanent

Bagian yang tetap atau yang permanent yaitu jumlah minimum yang harus tersedia agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar tanpa kesulitan keuangan.

b. Jumlah modal kerja yang variable yang jumlahnya tergantung aktivitas musiman dan kebutuhan-kebutuhan diluar aktivitas yang biasa.

Kebutuhan modal kerja yang permanent seharusnya atau sebaiknya dibiayai oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham. Semakin besar jumlah modal kerja yang dibiayai atau yang berasal dari investasi pemilik perusahaan akan semakin baik bagi perusahaan tersebut karena akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk memperoleh kredit, dan semakin besar jaminan bagi kreditur jangka pendek.

Pada umumnya sumber modal kerja suatu perusahaan dapat berasal dari :

- 1) Hasil operasional perusahaan adalah jumlah net income yang nampak dalam laporan perhitungan laba rugi ditambah dengan depresiasi dan amortisasi, jumlah ini menunjukkan jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan. Jadi jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan dapat dihitung dengan menganalisa laporan perhitungan laba rugi perusahaan tersebut. Dengan adanya keuntungan atau laba dari usaha perusahaan, dan apabila laba tersebut tidak diambil oleh pemilik perusahaan maka laba tersebut akan menambah modal perusahaan yang bersangkutan.

2) Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga (investasi jangka pendek) surat berharga yang dimiliki perusahaan dalam jangka pendek (marketable securities atau efek) adalah salah satu elemen aktiva lancar yang segera dapat dijual dan akan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Dengan adanya penjualan surat berharga ini menyebabkan terjadinya perubahan dalam unsure modal kerja yaitu dari bentuk surat berharga berubah menjadi uang kas. Keuntungan yang diperoleh dari surat berharga ini merupakan suatu sumber untuk bertambahnya modal kerja, sebaliknya apabila dalam penjualan tersebut terjadi kerugian maka akan menyebabkan berkurangnya modal kerja.

3) Penjualan aktiva tidak lancar

Penjualan aktiva tidak lancar menyebabkan perubahan aktiva tidak lancar menjadi kas atau piutang. Dengan demikian, perubahan ini menyebabkan pula bertambahnya modal kerja sebesar hasil penjualan aktiva tidak lancar tersebut.

4) Penjualan saham atau obligasi

Penjualan saham merupakan penarikan dana dari pemilik, peserta atau pengambil bagian didalam perusahaan. Dengan demikian, penjualan saham akan menambah modal kerja perusahaan.

Penjualan obligasi merupakan penarikan dana dari luar yang bersifat pinjaman jangka panjang. Penjualan obligasi akan menambah modal kerja dengan konsekuensi adanya kewajiban untuk membayar bunga tetap.

Disamping modal kerja diatas, masih terdapat sumber lain yang menambah aktiva lancar, tetapi tidak mempengaruhi modal kerja perusahaan, seperti uang muka langganan, kredit bank dan kredit jangka pendek lainnya.

2. Penggunaan Modal Kerja

Mengenai penggunaan dana atau modal kerja perusahaan, S. Munawir (2003:119), mengatakan sebagai berikut :

Pemakaian atau penggunaan modal kerja akan menyebabkan perubahan bentuk maupun penurunan jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan, tapi penggunaan aktiva tidak selalu diikuti dengan berubahnya atau turunnya jumlah modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan.

Golongan pertama, penggunaan modal kerja yang mengakibatkan berkurangnya aktiva lancar adalah sebagai berikut :

a. Pembayaran biaya atau ongkos-ongkos operasi perusahaan

Meliputi pembayaran upah, pembelian bahan baku, dan lain-lain. Pembayaran biaya operasi akan menimbulkan penghasilan perusahaan. Penggunaan modal kerja untuk pembayaran operasi baru akan timbul bila biaya-biaya tersebut lebih besar dari penghasilan atau timbul kerugian. Besarnya penggunaan modal kerja untuk biaya-biaya operasi dapat dilihat pada laporan laba rugi perusahaan, yaitu jumlah kerugian neto dikurang dengan biaya penyusutan dan amortisasi. Biaya penyusutan dan amortisasi dikurangi karena biaya-biaya tersebut tidak mengakibatkan pengurangan kas perusahaan.

- b. Kerugian yang dialami perusahaan karena adanya penjualan surat-surat berharga ataupun kerugian insidental lainnya. Besarnya penggunaan modal kerja karena kerugian ini dapat dilihat pada laporan laba rugi perusahaan, yaitu pada kelompok laba rugi lain-lain.
- c. Pengambilan untuk kepentingan pemilik, baik berupa uang tunai, maupun barang, pengambilan bagian keuntungan, maupun pembayaran deviden.

Transaksi tersebut menyebabkan penurunan sector modal yang diimbangi berkurangnya aktiva lancar atau bertambahnya hutang lancar.

- a. Penambahan aktiva tetap, investasi jangka panjang dan aktiva tidak lancar lainnya yang menyebabkan berkurangnya modal kerja.
- b. Pembentukan dana atau pemisahan aktiva lancar untuk tujuan tertentu dalam jangka panjang, misalnya dana pelunasan obligasi, pembentukan dana pensiun, dan lain-lain. Dengan adanya pembentukan dana tersebut menyebabkan perubahan bentuk aktiva lancar menjadi tidak lancar.
- c. Pembayaran hutang jangka panjang, seperti obligasi dan kewajiban lain-lain yang menyebabkan berkurangnya modal kerja.

Golongan kedua, penggunaan modal kerja yang mengakibatkan berubahnya bentuk aktiva lancar adalah sebagai berikut :

- a. Pembelian surat-surat berharga jangka pendek secara tunai.
- b. Pembelian barang dagangan atau bahan baku secara tunai.
- c. Perubahan bentuk piutang menjadi piutang lain-lain, misalnya piutang usaha menjadi piutang wesel.

2.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebutuhan Modal Kerja

Modal kerja yang cukup sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Namun, untuk menentukan besar kecilnya modal kerja yang dianggap cukup untuk suatu perusahaan bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah. Hal ini disebabkan kebutuhan modal kerja untuk setiap perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kebutuhan modal kerja pada setiap perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Sifat atau tipe perusahaan

Kebutuhan modal kerja pada perusahaan jasa atau non industry relative lebih kecil bila dibandingkan dengan perusahaan industry.

2. Waktu yang dibutuhkan, baik untuk memproduksi, maupun untuk memperoleh barang atau jasa yang dijual, serta harga per satuannya.

Semakin panjang waktu yang dibutuhkan baik untuk memproduksi, ataupun untuk memperoleh barang atau yang dijual, maka semakin besar pula modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Demikian pula halnya dengan harga pokok per satuan dari barang atau jasa yang dijual. Semakin tinggi harga pokok per satuan barang atau jasa yang dijual, maka semakin besar pula modal kerja yang dibutuhkan.

3. Tingkat perputaran persediaan

Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan, maka semakin kecil modal kerja yang dibutuhkan.

4. Tingkat perputaran piutang

Semakin tinggi tingkat perputaran piutang, maka semakin kecil modal kerja yang dibutuhkan.

5. “Credit Standing”

Perusahaan dan hubungan baik dengan bank atau supplier semakin tinggi “credit standing” perusahaan dan semakin baik hubungan dengan bank atau pemasok (supplier) maka semakin kecil modal kerja yang dibutuhkan.

6. Disamping faktor-faktor diatas, masih terdapat faktor-faktor yang lain, seperti faktor musiman, volume penjualan, jumlah rata-rata pengeluaran uang setiap harinya, dan lain-lain.

2.4. Pengelolaan Modal Kerja

Pengelolaan modal kerja memerlukan perhatian yang serius dari pimpinan perusahaan karena akan mempengaruhi aktivitas perusahaan sehari-hari. Pengelolaan modal kerja tidak hanya meliputi pengelolaan terhadap investasi dalam aktiva tidak lancar, tetapi juga meliputi pengelolaan terhadap penggunaan dana jangka pendek atau hutang lancar oleh perusahaan.

Meskipun analisis pengelolaan modal kerja belum seluas penelitian-penelitian keputusan modal permodalan jangka panjang, tetapi modal kerja yang tepat merupakan syarat keberhasilan suatu perusahaan apalagi bagi perusahaan kecil, disamping itu modal kerja sangat menentukan posisi likuiditas perusahaan dan likuiditas adalah persyaratan keberhasilan serta kontinuitas perusahaan.

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, uraian tentang pengelolaan modal dibatasi pada pengelolaan kas, pengelolaan piutang, pengelolaan persediaan, dan pengelolaan hutang lancar.

2.4.1. Pengelolaan Aktiva Lancar

Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal).

Dalam pembahasan aktiva lancar unu, penulis akan membatasi pada pengelolaan kas, piutang, dan persediaan, yang akan diuraikan berikut ini :

a. Pengelolaan Kas

Kas, atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan tetapi sudah ditentukan penggunaannya (misalnya uang kas yang disisihkan untuk pelunasan hutang obligasi, untuk pembelian aktiva tetap atau tujuan-tujuan lain) tidak dapat dimasukkan dalam pos kas. Termasuk dalam pengertian kas adalah check yang diterima dari para pelanggan dan simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro, demand deposit, yaitu simpanan di bank yang dapat diambil kembali setiap saat diperlukan oleh perusahaan.

Kas merupakan salah satu unsure modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Namun, kas yang berlebihan akan memperkecil profitabilitas perusahaan karena adanya dana yang menganggur. Sebaliknya, kekurangan

kas dapat menyebabkan perusahaan menjadi tidak likuid karena tidak dapat membayar tagihan yang sewaktu-waktu timbul. Oleh karena itu, pengelolaan kas harus dilakukan secara efisien dan efektif agar perusahaan tidak mengalami kerugian akibat adanya kelebihan ataupun kekurangan.

Pengelolaan mengandung pengertian mengelola uang perusahaan sedekian rupa sehingga dapat dicapai kesediaan kas maksimum dan pendapatan bunga yang maksimum dari uang tunai yang menganggur. Manajemen kas dengan kata lain berkaitan dengan optimalisasi tanpa ada ketidakefisiensi atau berlebihan dari sejumlah uang kas ditangan pada waktu yang tepat.

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kas adalah melakukan sinkronisasi arus kas (*synchronization of cash flows*), mempercepat arus kas masuk dan memperlambat arus kas keluar tanpa mengurangi kepercayaan pemberi kredit kepada perusahaan, serta melakukan pengembangan (*using float*).

Sinkronisasi arus kas merupakan sinkronisasi penerimaan kas terhadap pengeluarannya. Artinya arus kas keluar harus selalu dapat dipenuhi dari arus kas masuk perusahaan. Alat yang dapat diperlukan untuk melakukan sinkronisasi arus kas adalah dengan menyusun anggaran kas. Anggaran kas menunjukkan pola penerimaan dan pengeluaran kas dalam periode tertentu dimasa yang akan datang. Jadi, anggaran kas merupakan suatu peramalan terhadap posisi kas posisi kas perusahaan dalam periode tertentu dimasa yang akan datang. Dengan menyusun anggaran kas akan dapat diketahui

jauh hari sebelumnya kapan perusahaan akan mengalami deficit atau surplus kas.

Penyusunan anggaran kas hendaknya memperhatikan berbagai faktor, baik yang ada didalam perusahaan, maupun diluar perusahaan. Oleh karena itu, dalam penyusunan anggaran kas perlu mempertimbangkan berbagai asumsi, seperti kekuatan alat-alat produksi, tenaga kerja yang tersedia, tingkat harga, dan lain-lain. Dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi tersebut diharapkan anggaran kas dapat memberikan sumbangan yang maksimal terhadap perencanaan dan pengendalian kas perusahaan. Disamping itu, perlu juga diperhatikan bahwa anggaran tidak boleh untuk membatasi pengeluaran, tetapi hendaknya dipandang sebagai alat untuk mencapai penggunaan sumber daya perusahaan melalui cara yang efisien dan efektif. Hal ini yang perlu diperhatikan dalam menyusun anggaran kas adalah penentuan saldo kas minimum yang dianggap aman oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan sewaktu-waktu.

Jumlah kas minimum yang dianggap aman adalah sama dengan hari-hari kas yang diinginkan dikalikan dengan rata-rata pengeluaran kas untuk biaya eksploitasi perusahaan per hari. Hari-hari kas yang diinginkan merupakan periode yang mana pengeluaran untuk membiayai eksploitasinya harus dilakukan dari persediaan kas perusahaan. Penentuan lamanya hari-hari kas yang diinginkan perusahaan sebaiknya disesuaikan dengan rata-rata periode penerimaan kas yang berasal dari eksploitasi perusahaan. Rata-rata pengeluaran kas untuk biaya eksploitasi perusahaan per hari (average daily

outflows) dapat diperoleh dengan membagi tafsiran jumlah pengeluaran kas untuk eksploitasi perusahaan selama satu tahun dengan banyaknya hari dalam satu tahun.

Untuk mempercepat arus kas masuk, cara yang paling sederhana adalah mempercepat persiapan faktur dan penagihannya. Bagi perusahaan yang menggunakan cek dalam penagihannya, dapat dilakukan dengan cara mempercepat proses kliring cek. Cara lain yang dapat ditempuh adalah :

- 1) The Lock Box System (system kotak pos terkunci), dan
- 2) Concentration Banking (Bank konsentrasi).

Sistem kotak pos terkunci dilakukan dengan cara menyewa kotak pos terkunci di daerah setempat dan memberikan wewenang pada bank tertentu yang ada di daerah tersebut untuk mengambil pembayaran-pembayaran yang diterima di dalam kotak pos terkunci tersebut. Cara ini dimaksudkan untuk menghilangkan waktu antara penerimaan pembayaran dengan saat penyetoran ke bank. Setiap langganannya diharuskan untuk mengirimkan pembayarannya ke kotak pos terkunci tersebut. Bank yang diberi wewenang mengambil kiriman tersebut beberapa kali dalam sehari dan menyetorkannya pada rekening perusahaan. Atas transaksi tersebut, perusahaan menerima slip penyetoran dan daftar pembayarannya, serta bukti pendukungnya.

Bank konsentrasi (Concentration Banking) dilakukan dengan cara membentuk pusat-pusat penagihan yang strategis pada daerah-daerah tertentu. Cara ini dimaksudkan untuk mempersingkat periode antara saat pengiriman oleh langganannya dengan saat diterima oleh perusahaan untuk

digunakan. Setiap langganan diharuskan mengirimkam pembayarannya ke pusat-pusat penagihan yang sudah ditentukan oleh masing-masing daerah. Penentuan tempat-tempat pusat penagihan biasanya berdasarkan daerah geografis dan volume faktur yang dikirim kedaerah tersebut. Pembayaran-pembayaran yang diterima, kemudian disetorkan ke bank setempat. Kelebihan dana diatas saldo minimum dipindahkan dari bank setempat ke bank konsentrasi, yang didalamnya terdapat rekening utama perusahaan. Rekening utama tersebut umumnya merupakan rekening pengeluaran.

b. Pengelolaan Piutang

Piutang dalam neraca merupakan kekayaan suatu perusahaan yang mencerminkan jumlah uang yang dihutangkan kepada konsumen, untuk barang atau jasa yang diperjual belikan. Perusahaan yang telah memutuskan untuk menjual secara kredit akan timbul rekening piutang dalam neracanya. Karena piutang merupakan investasi yang tetap tertanam dalam perusahaan, maka harus hati-hati dalam menentukan kebijakan piutangnya.

Semakin proporsi dan jumlah penjualan kredit maka semakin besar pula piutang usaha yang dimiliki oleh perusahaan, dengan catatan bila hal-hal lain tetap. Yang dimaksud hal-hal lain ini adalah langganan tidak mengubah kebiasaan mereka dalam melunasi piutang tersebut. Disamping itu, terdapat pula piutang lain-lain timbul bukan dari penjualan kredit, seperti piutang pegawai, piutang pajak, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya akan penulis fokuskan pada piutang usaha.

Kebijakan kredit perusahaan (*firm's credit policy*) merupakan pedoman dalam menentukan pemberian kredit pada langganan yang merupakan pedoman dalam menentukan pemberian kredit kepada langganan dan berapa besarnya kredit tersebut diberikan. Dalam menentukan kebijakan kredit ada dua aspek yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan, yaitu standar kredit dan analisis kredit. Standar kredit dapat didefinisikan kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam menentukan pemberian kredit kepada pelanggan.

Variabel utama yang harus dipertimbangkan dalam menentukan standar kredit adalah volume penjualan, investasi dalam piutang, dan besarnya biaya karena tidak tertagihnya piutang (*bad debt expenses*).

Bila perusahaan menjalankan standar kredit yang longgar, artinya setiap langganan diperkenankan membeli secara kredit maka volume penjualan mungkin akan meningkat, tetapi proporsi piutang yang tidak tertagih dapat pula meningkat. Secara ekonomis, pelanggaran standar kredit dapat dibenarkan bila maksimumkan penambahan biaya peningkatan piutang sama dengan keuntungan karena peningkatan volume penjualan. Setelah perusahaan menentukan standar kredit, maka perusahaan menentukan pula prosedur untuk mengevaluasi permintaan kredit atau analisis kredit. Ada dua langkah yang harus dilakukan dalam proses analisis kredit, yaitu :

- 1) Menperoleh informasi kredit (*obtaining credit information*).
- 2) Mengalisis informasi tersebut dalam rangka menentukan keputusan pemberian kredit (*analyzing the information in order to make the credit decition*).

Syarat-syarat pembayaran piutang (*credit term*) merupakan cara pembayaran kembali piutang oleh pelanggan yang ditentukan oleh pelanggan. Umumnya digunakan bentuk singkatan, seperti 2/10, net 30, yang artinya adalah langganan akan memperoleh potongan tunai sebesar 2% bila piutang dibayar dalam waktu 10 hari, sedangkan jangka waktu pembayaran paling lambat 30 hari setelah penjualan kredit. Jadi dalam syarat-syarat pembayaran piutang umumnya menyangkut tiga hal yaitu :

- a) Potongan tunai, jika ada (dalam contoh diatas adalah 2%)
- b) Jangka waktu potongan tunai atau masa diskontpo (dalam contoh diatas adalah 10 hari)
- c) Jangka waktu pembayaran kredit (dalam contoh diatas adlah 30 hari)

Kebijakan penagihan piutang (*collection policies*) merupakan prosedur yang dilakukan dalam penagihan piutang pada saat jatuh tempo. Kebijakan penagihan piutang dapat bersifat aktif atau pasif. Selanjutnya, untuk menilai efektifitas penagihan piutang dapat dilakukan dengan menghitung tingkat perputaran dan periode penagihan piutang. Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan rasio industri atau rasio perusahaan sendiri dari tahun-tahun sebelumnya. Analisis efektifitas penagihan piutang dapat juga dilakukan dengan membandingkan syarat-syarat pembayaran piutang yang ditentukan dengan rata-rata periode penagihan piutang perusahaan. Bila syarat-syarat pembayaran kredit adalah 2/10, net 30, sedangkan rata-rata periode penagihan piutang kira-kira 30 hari maka pengelolaan piutang dapat dianggap cukup baik.

Analisis lain yang dapat dilakukan untuk menilai efektifitas penagihan piutang adalah dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*).

c. Pengelolaan Persediaan

Untuk perusahaan perdagangan yang dimaksudkan dengan persediaan adalah semua barang-barang yang diperdagangkan yang sampai tanggal neraca masih di gudang/belum laku dijual. Untuk perusahaan manufacturing (yang memproduksi barang) maka persediaan yang dimiliki meliputi persediaan bahan mentah, persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi.

Besar kecilnya persediaan yang dimiliki oleh perusahaan berpengaruh langsung terhadap resiko dan keuntungan perusahaan. Persediaan yang cukup akan menguntungkan perusahaan karena dapat memperlancar operasinya. Namun, jumlah persediaan yang terlalu berlebihan akan memperbesar biaya penyimpanan dan pemeliharaan gudang, memperbesar kemungkinan kerusakan dan resiko kecurian, menyebabkan keusangan, dan lain-lain. Sebaliknya, kekurangan persediaan akan mengakibatkan perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan dari langganan atau tidak dapat melakukan operasinya.

Oleh karena itu, perlu diusahakan tingkat persediaan yang optimal agar operasi perusahaan tidak terganggu dan di lain pihak dana yang tertanam dalam persediaan tidak berlebihan. Dengan demikian, masalah pengelolaan persediaan yang paling penting adalah menentukan berapa persediaan

optimal yang harus dipertahankan ditinjau dari sudut operasi perusahaan dan efisiensi biaya.

Keputusan atas pengelolaan persediaan, umumnya melibatkan beberapa fungsi operasional, yaitu fungsi produksi, pemasaran, pembelian, keuangan dan akuntansi. Untuk itu, perlu adanya koordinasi diantara fungsi-fungsi diatas sehingga pelaksanaan pengelolaan persediaan dapat berjalan dengan baik.

Agar diperoleh persediaan yang optimal, maka perusahaan perlu merencanakan dan mengendalikan persediaan sebaik-baiknya. Secara umum, ada dua permasalahan pokok yang harus diselesaikan dalam perencanaan dan pengendalian persediaan, yaitu :

- 1) Penentuan kuantitas persediaan yang akan dibeli
- 2) Penentuan saat pembelian dilakukan

Permasalahan pertama, yaitu penentuan kuantitas persediaan yang akan dibeli dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep “pesanan ekonomis (*economic Order Quantity = EOQ*)”. Konsep EOQ adalah suatu teknik untuk menentukan kuantitas pesanan pembelian dengan total biaya pesanan pembelian dan biaya penyelenggaraan persediaan yang paling minimal untuk setiap jenis persediaan. Konsep EOQ ini dapat dihitung dengan rumus :

$$EOQ = \sqrt{\frac{2.R.S}{P.I}}$$

Keterangan :

R = Jumlah (dalam unit) yang dibutuhkan selama satu periode tertentu, misalnya 1 tahun

S = Biaya pesanan setiap kali pesanan

P = Harga pembelian per unit yang dibayar

I = Biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang dinyatakan dalam persentase dari nilai rata-rata dalam rupiah dari persediaan.

Pembelian berdasarkan EOQ ini hanya dapat digunakan jika memenuhi beberapa asumsi, yaitu :

- a) Harga per unit konstan
- b) Barang yang dibutuhkan selalu tersedia di pasar
- c) Kebutuhan barang-barang tersebut relative stabil sepanjang tahun.

Sering kali perusahaan membeli persediaan dalam jumlah yang cukup besar dengan maksud untuk memperoleh potongan harga (*quantity discount*). Potongan harga ini akan mempengaruhi harga pembelian per unit. Dengan demikian, akan mempengaruhi pula terhadap EOQ. Namun, kerangka dasar EOQ hendaknya tetap dipergunakan sebagai dasar untuk menganalisis pembelian dengan potongan harga tersebut.

Permasalahan kedua, yaitu penentuan saat pembelian dilakukan dapat diselesaikan dengan “konsep titik pemesanan kembali (*reorder point*)”. Titik pemesanan kembali adalah suatu titik yang dipakai untuk menentukan saat pemesanan kembali sedemikian rupa sehingga penerimaan barang-barang yang dipesan dapat tepat pada persediaan mencapai persediaan pengaman (*safety stock*). Berdasarkan asumsi bahwa pemakaian persediaan relative stabil sepanjang tahun, maka titik pemesanan kembali dapat ditetapkan dengan cara :

- 1) Menetapkan jumlah penggunaan selama *lead time* dan ditambah dengan persentase tertentu. Misalkan ditetapkan bahwa safety stock sebesar 50% dari penggunaan selama *lead time*, dan ditetapkan bahwa lead timenya adalah 5 minggu sedangkan kebutuhan material setiap minggunya adalah 40 unit.

$$\text{Reorder point} = (5 \times 40) + 50\%(5 \times 40)$$

$$= 200 + 100$$

$$= 300 \text{ unit.}$$

- 2) Dengan menetapkan penggunaan selama lead time dan ditambah dengan penggunaan selama periode tertentu sebagai safety stock, misalkan kebutuhan selama 4 minggu.

$$\text{Reorder point} = (5 \times 40) + (4 \times 40)$$

$$= 200 + 160$$

$$= 360 \text{ unit.}$$

Analisis lain yang dapat digunakan dalam menilai pengelolaan persediaan adalah melalui analisis tingkat perputaran persediaan.

2.4.2. Pengelolaan Hutang Lancar

Pada hakekatnya pengelolaan hutang lancar berkaitan dengan pembelanjaan jangka pendek (*short time financing*) yang dilakukan perusahaan. Periode pembelanjaan perusahaan jangka pendek pada umumnya kurang dari satu tahun atau maksimal satu tahun. Perusahaan dapat

menggunakan sumber pembelanjaan jangka pendek untuk menunjang kebutuhan modal kerja agar kelangsungan proses produksi tidak terganggu.

Ada dua pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam mengelola pembelanjaan jangka pendek. Masalah yang pertama, yaitu yang menyangkut jumlah atau proporsi pembelanjaan jangka pendek yang dapat digunakan untuk membelanjai aktiva lancar perusahaan. Selanjutnya, masalah yang kedua, yaitu menyangkut penentuan sumber pembelanjaan jangka pendek mana yang harus dipergunakan oleh perusahaan.

Disatu pihak, hutang lancar merupakan sumber pembelanjaan jangka pendek, tetapi di lain pihak hutang lancar merupakan hal yang pertama menyebabkan perusahaan kekurangan kas (*cash inadequacy*). Oleh karena itu, sebelum menggunakan sumber pembelanjaan jangka pendek tertentu, pimpinan perusahaan hendaknya mempertimbangkan jumlah hutang lancar, baik yang dimiliki sekarang, maupun setelah ditambahkan hutang lancar yang baru.

Sehubungan dengan hal itu, ada beberapa pedoman yang dapat dipergunakan yaitu *current ratio*, *minimum net working capital* dan *limit on total indebtedness*. Dengan demikian, ada tiga pedoman yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan jumlah atau proporsi hutang lancar sebagai sumber jangka pendek perusahaan yaitu :

a. *Current Ratio*

Current ratio merupakan ukuran yang sangat berguna untuk menganalisa posisi modal kerja suatu perusahaan. Ratio ini menunjukkan bahwa nilai

keayaan lancar (yang segera dapat dijadikan uang) ada sekian kalinya hutang jangka pendek. Current ratio 200% kadang-kadang sudah memuaskan bagi suatu perusahaan, tetapi jumlah modal kerja dan besarnya ratio tergantung pada beberapa faktor, suatu standard atau rasio yang umum tidak dapat ditentukan untuk seluruh perusahaan. Current ratio 200% hanya merupakan kebiasaan dan akan digunakan sebagai titik tolak untuk mengadakan penelitian atau analisa yang lebih lanjut.

b. *Minimum Net Working Capital*

Untuk menganalisa posisi modal kerja dapat juga digunakan beberapa ratio lainnya, misalnya ratio antara aktiva lancar dengan total aktiva, ratio antara tiap pos-pos dalam aktiva lancar dengan total aktiva lancar, ratio antara total hutang lancar dengan total hutang, ratio antara tiap-tiap pos hutang lancar dengan total hutang lancar dan lain-lain.

Dapat disimpulkan bahwa kebutuhan modal kerja perusahaan sama dengan perputaran modal kerja dikali dengan pengeluaran kas rata-rata setiap harinya untuk biaya eksploitasi perusahaan.

c. Kebijakan pembatasan hutang (*limit on total indebtedness*).

Kebijakan pembatasan hutang merupakan pedoman yang ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dalam menentukan proporsi hutang, baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang yang akan digunakan perusahaan sebagai sumber pembelanjanya. Kebijakan pembatasan hutang ini hendaknya berpedoman pada current ratio dan modal kerja neto minimum.

Ketiga pedoman diatas saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga masing-masing perlu mendapat perhatian yang serius.

Dalam menentukan sumber pembelanjaan jangka pendek yang akan dipergunakan, pimpinan perusahaan harus mengetahui keuntungan atau kerugian dari masing-masing pembelanjaan jangka pendek tersebut. Pembahasan selanjutnya akan penulis fokuskan pada sumber pembelanjaan jangka pendek yang berasal dari hutang usaha/dagang (*trade credit*).

2.5. Rasio-rasio Yang Digunakan Dalam Analisa Modal Kerja

Perkembangan modal kerja dari waktu ke waktu perlu dianalisis. Hasil analisis ini sangat berguna bagi pimpinan perusahaan untuk merencanakan untuk merencanakan dan mengendalikan modal kerja di masa yang akan datang. Sehubungan dengan itu, akan diuraikan beberapa analisis rasio yang berkaitan dengan modal kerja, yaitu :

Analisis rasio merupakan analisis yang berguna untuk mengetahui hubungan antara pos yang satu dengan pos yang lain dalam neraca atau laporan rugi laba perusahaan, baik secara individu maupun dari kombinasi keduanya. Rasio-rasio tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Rasio Likuiditas, yaitu rasio-rasio yang dimaksudkan untuk menilai likuiditas perusahaan, misalnya current ratio, acid test ratio, cash ratio.
2. Rasio Leverage, yaitu rasio-rasio untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang, misalnya total debt to equity ratio, long term debt to equity ratio.

3. Rasio Aktivitas, yaitu rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber dananya, misalnya receivable turn-over, inventory turn-over, working capital turn-over.
4. Rasio Keuntungan, yaitu rasio-rasio untuk menilai hasil usaha perusahaan, misalnya gross margin on sales

